JURNAL ILMIAH
MULTIDISIPLIN ILMU
Halaman Jurnal: https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi
Halaman UTAMA Jurnal : https://journal.smartpublisher.id/

DOI: https://doi.org/10.69714/98w93t84

PEMIKIRAN POLITIK PADA MASA KHULAFAUR RASYIDIN

Adelia Ramzar[a*], Muhammad Hidayat Harahap[b], Tengku Najib Ahmad Kamil[c]
[a] Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam / Aqidah dan Filsafat Islam, adeliaramzar@gmail.com,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara
[b] Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam / Aqidah dan Filsafat Islam, muhammadhidayatharahap@gmail.com,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara
[c] Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam / Aqidah dan Filsafat Islam, tengkunajibahmadkamil@gmail.com,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara
[*] korespondensi

ABSTRACT

The Khulafaur Rasyidin era (632–661 CE) was a pivotal period in Islamic history, marked by the leadership of the first four caliphs: Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali. The political thought of this era emphasized principles of justice, consultation (shura), and the application of Islamic law (sharia) in governance. Each caliph adopted distinct approaches to state administration, such as Abu Bakr's emphasis on collective consultation and Umar's establishment of a more bureaucratic governance structure. Despite political and social challenges, including territorial expansions and internal conflicts, the political foundations of the Rashidun Caliphate underscored the importance of just leadership and the unity of the Muslim community. This political philosophy significantly contributed to the development of Islamic governance rooted in justice and sharia.

***Keywords**: Khulafaur Rasyidin, Leadership, Political Thaugt*

Abstrak

Masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M) adalah periode penting dalam sejarah Islam yang ditandai dengan kepemimpinan empat khalifah pertama: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pemikiran politik pada masa ini mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah (syura), dan penerapan syariat Islam dalam pemerintahan. Setiap khalifah menerapkan pendekatan berbeda dalam mengelola negara, seperti sistem musyawarah di bawah Abu Bakar dan struktur pemerintahan lebih birokratis di masa Umar. Meskipun tantangan politik dan sosial muncul, terutama dalam menghadapi penaklukan dan konflik internal, dasar-dasar pemikiran politik Khulafaur Rasyidin tetap menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan kesatuan umat. Pemikiran ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan pemerintahan Islam yang berlandaskan keadilan dan syariat.

Kata Kunci: Khulafaur Rasyidin, Kepemimpinan, Pemikiran Politik

1. PENDAHULUAN

Masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M) merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah perkembangan politik Islam. Pada masa ini, empat khalifah pertama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memimpin umat Islam dengan pendekatan yang sangat berbeda-beda, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, musyawarah (*shura*), dan pemerintahan yang berdasarkan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran politik pada masa Khulafaur Rasyidin, dengan fokus utama pada penerapan nilai-nilai politik Islam dalam pemerintahan mereka dan bagaimana masing-masing khalifah menghadapi tantangan yang timbul selama kepemimpinannya.

Received Januari 21, 2025; Revised Maret 28, 2025; Accepted April 11, 2025; Published April 15, 2025

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemikiran politik yang berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin mempengaruhi struktur pemerintahan Islam, baik dalam hal pengambilan keputusan, administrasi negara, maupun pengelolaan hubungan sosial dan politik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan politik antara para khalifah, serta dampak jangka panjang dari kepemimpinan mereka terhadap pembentukan pemerintahan Islam yang lebih terorganisir.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana konsep keadilan, musyawarah, dan kepemimpinan yang adil diterapkan oleh para khalifah pertama Islam. Sebagai bagian dari kajian ini, perhatian juga diberikan pada tantangan-tantangan yang dihadapi para khalifah, seperti pemberontakan internal, konflik sosial-politik, dan perbedaan pandangan dalam menentukan suksesi kepemimpinan. Pemikiran politik yang berkembang pada masa ini menjadi sangat relevan dalam memahami dinamika politik Islam, serta memberikan gambaran mengenai perubahan yang terjadi dalam struktur politik umat Islam pada masa awal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemikiran politik pada masa Khulafaur Rasyidin sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tantangan besar yang dihadapi para khalifah, terutama dalam menghadapi perpecahan internal dan pemberontakan, menuntut penyesuaian dalam sistem pemerintahan. Para khalifah berusaha keras menjaga kesatuan umat Islam dan mempertahankan keadilan dalam masyarakat yang semakin berkembang. Hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, mulai dari musyawarah dalam pengambilan keputusan hingga pengelolaan ekonomi negara yang berfokus pada pemerataan.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pemikiran politik pada masa Khulafaur Rasyidin, dengan menyoroti bagaimana para khalifah memadukan ajaran Islam dengan tantangan praktis yang mereka hadapi. Pemikiran politik yang berkembang selama masa ini menjadi landasan penting dalam pembentukan pemerintahan Islam di masa-masa berikutnya dan memberikan kontribusi besar dalam membentuk struktur politik yang lebih kompleks di dunia Islam.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk mengumpulkan data dan menganalisis pemikiran politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Dalam pendekatan ini, penulis mengkaji berbagai artikel, buku, dan sumber-sumber primer yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti karya-karya sejarah, tafsir, dan literatur ilmiah yang mengupas aspek politik Islam pada masa khalifah pertama. Dengan memanfaatkan kajian-kajian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika politik yang terjadi pada masa tersebut.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur-literatur yang membahas kepemimpinan, kebijakan pemerintahan, dan konflik internal yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Artikel-artikel yang ditinjau mencakup kajian tentang pemikiran politik para khalifah, serta peran mereka dalam mempertahankan stabilitas politik dan sosial umat Islam. Data yang diperoleh dari berbagai sumber ini digunakan untuk menganalisis perbedaan pendekatan yang diambil oleh masing-masing khalifah dalam menghadapi tantangan yang ada, serta untuk mengidentifikasi kontribusi mereka terhadap pembentukan sistem pemerintahan Islam yang lebih terstruktur.

Metode tinjauan literatur ini juga memungkinkan penulis untuk membandingkan berbagai perspektif yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kepemimpinan dan pemikiran politik Khulafaur Rasyidin. Dengan cara ini, penulis dapat menyusun pemahaman yang lebih holistik tentang cara-cara pemerintahan dijalankan, serta dampaknya terhadap perkembangan politik Islam di masa mendatang. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan satu sumber, melainkan menggabungkan berbagai pendapat yang saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan akurat.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengandalkan metode tinjauan literatur untuk menggali informasi dan menganalisis pemikiran politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Dengan mengumpulkan dan membandingkan data dari berbagai artikel dan sumber sejarah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kepemimpinan dan sistem politik yang diterapkan oleh para khalifah pertama dalam sejarah Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemerintahan Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Abu Bakar Ash-Shiddiq lahir di Mekah pada tahun 573 M, dua tahun enam bulan setelah peristiwa Tahun Gajah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib al-Qurasyi At-Taimi. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek keenam mereka, Murrah bin Ka'ab. Gelarnya, Abu Bakar, berasal dari kata al-Bakr, yang berarti unta muda yang kuat, sedangkan gelar al-Atiq diberikan oleh Rasulullah SAW karena ia dianggap terbebas dari api neraka. Abu Bakar tumbuh sebagai seorang pedagang kain yang sukses dan dihormati karena kepribadiannya yang mulia. Keislamannya, yang diterima tanpa keraguan, menjadi salah satu momen penting dalam sejarah dakwah Islam karena membawa dampak signifikan terhadap perkembangan agama ini [1].

Sebagai sahabat terdekat Rasulullah SAW, Abu Bakar memainkan peran penting dalam penyebaran Islam pada masa awal. Ia dikenal sebagai seorang da'i yang berhasil mengajak sejumlah tokoh penting, seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, untuk memeluk Islam. Pendekatannya yang lembut dalam berdakwah mencerminkan prinsip Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Selain itu, ia menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap dakwah dengan mengorbankan hartanya untuk membantu kaum lemah dan membebaskan budak yang tertindas. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, terjadi perdebatan mengenai pengganti beliau. Abu Bakar menegaskan bahwa pemimpin harus berasal dari Quraisy, dan meskipun awalnya mengusulkan Umar bin Khattab, ia akhirnya dipilih sebagai khalifah pertama karena pengakuan terhadap kapasitas kepemimpinannya.

Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar memimpin umat Islam dengan pendekatan yang menggabungkan aspek politik dan spiritual. Meskipun sistem pemerintahan yang diterapkan menyerupai struktur monarki, prinsip pewarisan kekuasaan tidak didasarkan pada keturunan, melainkan pada kelayakan dan kepercayaan. Hal ini terlihat ketika Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya meskipun tidak ada hubungan kekerabatan di antara mereka. Selain memimpin urusan politik, Abu Bakar juga berperan sebagai pemimpin agama yang menjaga stabilitas keimanan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pendekatan ini menjadi model kepemimpinan yang adaptif dalam menghadapi tantangan awal pemerintahan Islam.

Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar juga memperkenalkan pembagian kekuasaan yang melibatkan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Sebagai eksekutif, ia memegang kendali penuh atas pemerintahan, sementara fungsi yudikatif dipercayakan kepada sahabat-sahabat yang ahli, seperti Umar bin Khattab yang menjadi qadhi di Madinah. Ia juga mengangkat sejumlah sahabat untuk mengelola wilayah dan fungsi administrasi, seperti Abu Ubaidah yang bertugas di baitul mal, Khalid bin Walid sebagai pemimpin militer, serta Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris. Dengan langkah-langkah ini, Abu Bakar berhasil membangun fondasi pemerintahan Islam yang berorientasi pada keadilan dan efisiensi [1].

Abu Bakar menghidupkan sistem *syura* dalam pengambilan keputusan penting dengan melibatkan orang-orang kompeten, melanjutkan tradisi musyawarah yang juga diterapkan oleh Rasulullah SAW, seperti pada Perang Uhud, meskipun Rasulullah memiliki keputusan mutlak berdasarkan wahyu [2]. Abu Bakar memimpin sebagai khalifah selama sekitar 2 tahun, 3 bulan, dan 10 hari (632–634 M), dan meskipun masa pemerintahannya singkat, beliau berhasil melakukan reformasi dan penataan pemerintahan yang signifikan. Salah satu langkah awalnya adalah menghadapi pemberontakan beberapa suku Arab yang menolak kepemimpinannya dan menganggap perjanjian damai dengan Nabi Muhammad tidak lagi berlaku setelah wafatnya Nabi.

Beberapa pemberontak, seperti Musailimah al-Kazzab dan Thulaihah bin Khuwailid, bahkan mengaku sebagai nabi, namun pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Abu Bakar juga menghadapi pemberontakan di Bahrain, yang diselesaikan melalui jalur militer setelah diplomasi gagal, dikenal sebagai Perang Riddah. Perang ini tidak hanya menumpas pemberontakan, tetapi juga menyatukan kembali Jazirah Arab di bawah kekuasaan Madinah. Pemerintahan Abu Bakar menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk pembenahan politik, perluasan wilayah Islam, dan penyatuan bangsa Arab dengan sistem pemerintahan sentralistik, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan khalifah, serta melibatkan sahabat-sahabat senior seperti Umar, Utsman, dan Ali dalam pengambilan keputusan penting [3].

3.2. Pemikiran Politik di Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khattab, yang lahir 12 tahun setelah Tahun Gajah dan memeluk Islam pada usia 27 tahun, dikenal sebagai sahabat yang memiliki banyak inisiatif sejalan dengan wahyu, seperti penetapan maqam Ibrahim sebagai tempat salat, ayat hijab, dan masalah tawanan Perang Badar, yang menunjukkan kapasitas intelektual dan kebijaksanaannya. Setelah wafatnya Abu Bakar as-Shiddiq, Umar diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung oleh Abu Bakar, yang sebelumnya bermusyawarah dengan para sahabat sebelum melantiknya sebagai pemimpin umat Muslim [4]. Gelar Amirul Mukminin pertama kali digunakan oleh Umar, yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab setelah bai'at resmi dilakukan.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau melanjutkan program yang dimulai Abu Bakar, termasuk ekspansi wilayah ke Mesir, Irak, Suriah, dan Mesopotamia, serta penanganan tegas terhadap orang yang enggan membayar zakat, munafik, dan murtad untuk menjaga stabilitas umat. Umar dikenal sebagai pemimpin yang berani dan peduli, seperti ketika membantu keluarga kelaparan dengan membawa sendiri gandum dari gudang pangan. Dalam urusan keagamaan, beliau memprioritaskan kesatuan akidah dan politik dengan memindahkan kaum Nasrani dari Najran dan orang Yahudi dari Khaibar serta Fadak, sambil memberikan kompensasi demi menjaga persatuan umat. Umar juga melakukan ijtihad, seperti mendokumentasikan Al-Qur'an dan menetapkan salat tarawih berjamaah, menunjukkan perhatiannya terhadap kemaslahatan umat. Selama sepuluh tahun pemerintahannya, Umar membangun infrastruktur, mendirikan Baitul Mal, dan mengatur administrasi serta keuangan negara dengan prinsip keadilan. Sebelum wafat akibat serangan Abu Lu’luah, Umar membentuk dewan syura untuk memilih penggantinya, yang akhirnya menetapkan Usman sebagai khalifah [5].

3.3. Pemikiran Politik di Masa Ustman bin Affan

Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, seorang pedagang kaya dari Bani Umayyah, terpilih sebagai khalifah ketiga. Pemerintahan Utsman ditandai dengan pembagian struktur pemerintahan yang mencakup posisi wazir, sistem administrasi keuangan melalui Baitul Mal, dan penguatan militer yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti al-Walid dan Abu Musa al-Asy’ari. Beliau juga membentuk Majelis Syura untuk menampung aspirasi masyarakat dan melanjutkan ekspansi wilayah ke daerah seperti Mesir, Azerbaijan, dan Armenia. Di bidang ekonomi, Utsman menerapkan prinsip keadilan dengan tidak memberatkan rakyat melalui pajak, sementara di bidang agama, ia menyusun mushaf Al-Qur'an untuk menjaga kesatuan umat [6].

Namun, ketegangan mulai muncul pada pertengahan masa pemerintahannya, terutama karena kebijakan mengganti banyak gubernur yang diangkat Umar dengan kerabatnya sendiri, yang sering bertindak tidak adil. Ketidakpuasan terhadap Utsman memuncak dengan pengaruh besar keluarganya, khususnya Marwan bin Hakam, yang dianggap menguntungkan keluarga Utsman tetapi merugikan rakyat. Beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Talhah bin Ubaidillah mencoba menasihati Utsman, tetapi kebijakan tersebut tidak berubah. Ketegangan ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Saba’ untuk menyebarkan propaganda yang mendukung Ali, memperluas ketidakpuasan hingga ke Mesir, Basrah, dan Kufa [7].

Akhirnya, sekelompok pemberontak dari Mesir dan daerah lainnya mengepung rumah Utsman setelah menemukan surat yang diduga berisi perintah untuk membunuh mereka. Pengepungan berlangsung selama tiga hari, dan Utsman dibunuh secara kejam saat membaca Al-Qur'an setelah salat Subuh. Peristiwa tragis ini terjadi ketika Utsman berusia 82 tahun, setelah 12 tahun memimpin, dan menjadi awal perpecahan di kalangan umat Islam yang berlanjut pada masa-masa berikutnya [8].

3.4. Pemikiraan Politik di Masa Ali bin Abi Thalib

Setelah wafatnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai khalifah keempat. Dalam pidato pertamanya, ia menekankan pentingnya berpegang pada Al-Qur'an dalam menentukan kebaikan dan keburukan, serta menyerukan agar umat Islam tidak menyakiti sesama, termasuk non-Muslim. Ali memulai pemerintahannya dengan menarik kembali tanah yang sebelumnya diberikan Utsman kepada keluarganya dan mendistribusikan hasilnya untuk kepentingan negara. Ia juga menghidupkan kembali sistem distribusi pajak tahunan dan menerapkan pajak jizyah secara adil. Ali menunjukkan sikap egaliter dengan memberikan teladan, seperti dalam kasus hukum melawan seorang Yahudi, di mana hakim memutuskan untuk memenangkan pihak Yahudi karena Ali tidak memiliki bukti. Kepemimpinannya berusaha mengembalikan keadilan sebagaimana masa Umar dan Abu Bakar, meskipun situasi politik yang kacau membuat upayanya kurang berhasil [9].

Kepemimpinan Ali menghadapi berbagai pemberontakan besar yang memperburuk perpecahan umat Islam. Salah satunya adalah Perang Jamal, di mana ia menghadapi Aisyah, Thalhah, dan Zubair, yang menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman. Konflik ini berakar pada perbedaan pandangan tentang siapa yang berhak memimpin umat Islam setelah Utsman. Meski Ali memenangkan pertempuran, dampak Perang Jamal mengurangi otoritasnya. Perang Shiffin juga menjadi pemberontakan signifikan, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, menolak mengakui Ali sebagai khalifah. Keputusan untuk melakukan arbitrase setelah pertempuran di Shiffin melemahkan posisi Ali di mata sebagian pendukungnya dan menyebabkan hilangnya dukungan dari kelompok Khawarij, yang kemudian menentangnya [10].

Selain konflik politik, masa kekhalifahan Ali mencerminkan perpecahan ideologis di kalangan umat Islam. Kelompok Khawarij, yang menolak arbitrase karena menganggap hanya Allah yang berhak menentukan hukum, menjadi ancaman baru. Perang melawan mereka berujung pada kemenangan Ali di Perang Nahrawan, tetapi ajaran Khawarij tetap bertahan sebagai ancaman politik dan teologis. Perpecahan ini menandai transisi dari pemerintahan berbasis konsensus menuju sistem dinasti, yang terlihat dari berdirinya Dinasti Umayyah oleh Muawiyah setelah wafatnya Ali. Konflik yang dihadapi Ali menjadi awal pembentukan sekte-sekte dalam Islam, seperti Syi'ah dan Khawarij, yang terus memengaruhi dinamika umat Islam hingga saat ini [10].

Dalam perbandingan dengan tiga khalifah sebelumnya, kepemimpinan Ali memiliki perbedaan signifikan. Abu Bakar dan Umar memimpin dalam kondisi relatif stabil dengan fokus pada perluasan wilayah Islam dan reformasi administrasi, sementara Utsman menghadapi kritik atas kebijakan yang menguntungkan keluarganya. Sebaliknya, masa pemerintahan Ali penuh dengan konflik internal, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Dalam hal pemilihan, Ali diangkat sebagai khalifah oleh sebagian umat Islam di Madinah setelah pembunuhan Utsman, tetapi tidak semua wilayah mengakui kepemimpinannya. Muawiyah, misalnya, menuntut keadilan atas kematian Utsman sebelum mengakui Ali sebagai khalifah. Perpecahan ini menandai masa akhir Khulafaur Rasyidin dan awal dari sistem pemerintahan dinasti dalam sejarah Islam [11].

Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran politik pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, mencerminkan upaya untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan persatuan umat Islam meskipun menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Ali memulai pemerintahannya dengan kebijakan reformasi, seperti menarik kembali harta negara yang disalahgunakan dan menegakkan distribusi kekayaan secara adil. Ia menekankan pentingnya kepatuhan pada Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam memutuskan persoalan politik dan sosial, sekaligus menunjukkan sikap egaliter dalam kepemimpinannya. Meski berusaha mencontoh keadilan seperti masa Umar bin Khattab dan Abu Bakar, Ali menghadapi situasi yang jauh lebih sulit, terutama karena adanya perpecahan di kalangan umat Islam yang menyebabkan pemberontakan dan perang saudara, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin. Konflik-konflik ini tidak hanya melemahkan stabilitas politik tetapi juga menciptakan perpecahan ideologis yang membentuk dasar lahirnya sekte-sekte seperti Syi'ah dan Khawarij.

Secara keseluruhan, masa Khulafaur Rasyidin mencerminkan transisi penting dalam sistem politik Islam, dari model berbasis konsensus yang menonjol pada masa Abu Bakar dan Umar, menuju tantangan baru yang lebih kompleks di masa Utsman dan Ali. Pada masa Ali, pemikiran politiknya menunjukkan tekad untuk mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan pemerintahan yang bersih di tengah pergolakan yang melibatkan kepentingan politik, ideologi, dan kekuasaan. Namun, konflik internal dan pemberontakan memperlihatkan betapa sulitnya menjaga stabilitas di tengah kondisi masyarakat yang semakin terpecah. Kajian ini mengungkapkan bahwa masa Ali menandai awal perubahan signifikan dalam sejarah politik Islam, termasuk peralihan menuju sistem dinasti, yang dimulai dengan berdirinya Dinasti Umayyah oleh Muawiyah. Pemikiran politik Khulafaur Rasyidin secara keseluruhan menjadi landasan penting dalam sejarah Islam, memberikan pelajaran tentang dinamika kepemimpinan, keadilan, dan tantangan menjaga persatuan umat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Abu Bakar al-Shiddiq adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW, yang memimpin dengan penuh dedikasi dan kepemimpinan yang kuat. Ia dikenal karena kesetiaannya pada Nabi, keberhasilannya menyebarkan Islam, serta kemampuannya menjaga persatuan umat Islam pasca wafatnya Nabi. Sebagai khalifah, ia berhasil menanggulangi pemberontakan dan memperluas wilayah Islam melalui Perang Riddah, serta memperkenalkan sistem pemerintahan berbasis musyawarah (syura). Meskipun masa

pemerintahannya singkat, Abu Bakar berhasil menata pemerintahan, memperkuat politik negara, dan menyatukan bangsa Arab di bawah kekuasaan Madinah.

Umar bin al-Khattab adalah khalifah kedua yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana, tegas, dan adil. Selama pemerintahannya, ia melanjutkan ekspansi wilayah Islam, menegakkan hukum, dan memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat. Umar juga terkenal dengan kebijakan moderat, seperti ijtihad dalam masalah agama dan komunikasi berbasis musyawarah. Ia berhasil meletakkan dasar pemerintahan yang kuat, termasuk infrastruktur dan sistem administrasi negara. Kepemimpinannya ditandai dengan keadilan, keberanian, dan kepedulian terhadap umat. Setelah wafatnya, Umar menunjuk enam orang sahabat untuk bermusyawarah dalam memilih penggantinya, yang kemudian jatuh pada Usman bin Affan.

Khalifah Utsman bin Affan, yang berasal dari keluarga Umayyah, memerintah selama 12 tahun dengan sejumlah kebijakan penting dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah pengembangan struktur pemerintahan, ekonomi, militer, serta penyusunan Al-Qur'an untuk menjaga kesatuan umat Islam. Namun, ketidakpuasan terhadap kebijakan Utsman yang memprioritaskan keluarganya dan penggantian banyak gubernur dengan kerabat menyebabkan ketegangan. Puncaknya, Utsman dibunuh oleh pemberontak pada tahun 656 M, yang menandai awal perpecahan besar dalam umat Islam.

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan perpecahan politik dan pemberontakan di kalangan umat Islam setelah kematian Utsman bin Affan. Ali berusaha mengembalikan pemerintahan yang adil dan bersih dengan menegakkan keadilan ekonomi dan sosial, serta memperhatikan kesejahteraan rakyat. Namun, konflik internal, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, memperburuk stabilitas politik dan menyebabkan perpecahan ideologis, terutama dengan munculnya kelompok Khawarij. Ali memimpin dalam situasi yang kacau dan tidak stabil, yang akhirnya membuka jalan bagi pendirian Dinasti Umayyah. Masa pemerintahannya menandai perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan Islam dan memengaruhi perkembangan sektesekte dalam Islam, seperti Syi'ah dan Khawarij.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Misrayanti, N. Aeni, and N. A. Syakur, "Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq (Simbol Pemersatu Umat Islam)," *Rihlah*, vol. 11, no. 02, pp. 139-149, Dec. 2023.

[2] H. Firmansyah, "Muhammad SAW pada Periode Mekah," *AT-TAFKIR: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan*, vol. 12, no. 1, 2019. https://doi.org/10.32505/at.v12i1.806.

[3] S. Aly, "Pemikiran Politik Islam," 2017.

[4] M. Muthiullah and I. Yuliati, "Pembaruan Pemikiran Pada Masa Pemerintahan Umar Ibn Khattab Dan Implikasinya Pada Kemajuan Umat," *AL-MUFASSIR*, vol. 3, no. 2, 2021. https://doi.org/10.32534/amf.v3i2.3057.

[5] N. Abbas, "Strategi Komunikasi Pemerintahan di Masa Umar Ibn Al-Khattab," *Jurnal Iṣlāh*, vol. 4, no. 1, May 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5617.

[6] M. Maisyaroh, "Kepemimpinan 'Utsman bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib," *Ihya Al Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, vol. 5, no. 2, 2019. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.30821/ihya.v5i2.5991.

[7] N. Rahmawati and S. Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, "Sistem Pemerintahan Islam: Vol. I," no. 1, 2015.

[8] M. Arif, "Pemerintahan Khalifah Usman bin Affan (Analisis Historis Sebab-Sebab Munculnya Pemberontakan)," 2015.

[9] S. Sari, "Sistem pemerintahan pada masa Ali Bin Abi Thalib dalam perspektif Fiqih siyasah dan relevansinya dengan pemerintahan Indonesia," Skripsi, Univ. Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019. http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13745.

[10] N. H. Hasibuan, A. Afrizal, and S. Sawaluddin, "Ali bin Abi Thalib: Kekhalifahan di Tengah Tiga Pemberontakan Besar," *Jurnal Sains Student Research*, vol. 2, no. 6, pp. 514-525, Dec. 2024. https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.3009.

[11] I. Norvaizi, S. I. Latifah, and D. Ariyani, "Sejarah Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib: Analisis Peranannya dalam Perkembangan Peradaban Islam," *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, vol. 9, no. 1, 2024. http://dx.doi.org/10.29300/ttjksi.v9i1.5677.